

## PENDAHULUAN

Uni Eropa atau yang biasa disingkat UE adalah organisasi antarpemerintahan dan supra-nasional, yang beranggotakan negara – negara Eropa. Sejak 1 Juli 2013 telah memiliki 28 negara anggota. Organisasi ini didirikan dalam *Perjanjian Uni Eropa* (yang lebih dikenal dengan Perjanjian Maastricht) pada tahun 1992.

Organisasi internasional ini bekerja melalui gabungan sistem supranasional dan antarpemerintahan. Di beberapa bidang, keputusan-keputusan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat di antara negara-negara anggota, dan di bidang-bidang lainnya lembaga-lembaga organ yang bersifat supranasional menjalankan tanggung jawab UE tanpa perlu persetujuan anggota – anggotanya. Lembaga – lembaga penting di dalam UE adalah Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Mahkamah Eropa, dan Bank Sentral Eropa. Di samping itu, terdapat pula Parlemen Eropa yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh warga negara anggota.

Uni Eropa pada awalnya merupakan suatu organisasi regional yang anggotanya adalah negara-negara Eropa Barat. Namun seiring berjalannya waktu, perluasan Uni Eropa tidak dapat dihindarkan dan mulai

seperti kebutuhan Uni Eropa sendiri. Sejak akhir dekade 1990-an, Uni Eropa mulai bertujuan untuk mengembangkan Eropa yang lebih luas agar dapat melebarkan pengaruhnya, terlebih sejak keruntuhan Uni Soviet dan Yugoslavia terjadi.

Upaya Uni Eropa dalam melakukan demokratisasi dan Eropanisasi di Negara Baltik dan Negara Visegrad dapat dikatakan membuahkan hasil positif dengan cukup cepat, karena semua negara tersebut mengubah ideologinya dari sosialis menjadi demokratis pada akhir 1990-an dan awal 2000-an serta dapat menjadi anggota Uni Eropa. Salah satu negara yang dibantu oleh Uni Eropa dalam proses demokrasi ialah Kroasia.

Dalam sejarahnya, Kroasia merupakan negara bagian dari Republik Sosialis Federal Yugoslavia. Setelah kematian Presiden Josep Bros Tito pada tahun 1980, Yugoslavia mengalami krisis ekonomi dan sosial. Dampak dari krisis tersebut ialah negara – negara dalam kawasan Yugoslavia menjadi tidak stabil, salah satunya Kroasia. Pada bulan April hingga Mei tahun 1990 dilakukan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh berbagai partai politik di Kroasia. Partai yang memenangkan

pemilu tersebut adalah partai *Croatian Democratic Union* (HDZ). Franjo Tudman sebagai pemimpin partai HDZ akhirnya terpilih menjadi Presiden Kroasia. Kroasia lalu secara resmi melepaskan diri dan memperoleh kemerdekaannya pada 25 Juni 1991. Franjo lalu memproklamkan kemerdekaan Kroasia pada 8 Oktober 1991. Akan tetapi, baru pada tahun 1992 Kroasia memperoleh pengakuan sebagai negara merdeka yang berdaulat oleh PBB (Crijenko, 2013).

Uni Eropa melakukan proses penyebaran nilai – nilai demokrasi dengan lebih *soft*. Uni Eropa menganggap bahwa proses demokrasi yang dilakukan dengan cara kekerasan tidak akan efektif dan hanya akan merugikan kedua negara. Dalam menjalankan demokratisasi, Uni Eropa menggunakan beberapa cara yang lebih dapat diterima dan memiliki nilai – nilai positif pada negara yang dituju antara lain bantuan luar negeri dan dampingan secara teknis. Hal inilah yang akan diterapkan Uni Eropa dalam prosesnya membantu Kroasia dalam berdemokrasi.

Uni Eropa berencana untuk menciptakan hubungan yang baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial dengan negara-negara tetangga barunya di Eropa Timur pasca keruntuhan dua negara besar yaitu

Yugoslavia dan Uni Soviet. Uni Eropa menyediakan dana dalam memperluas Eropanisasi atau ide-ide Eropanya melalui nilai dan kebijakan-kebijakan yang dibuat yang ditujukan untuk negara-negara non-anggota. Salah satu proses bantuan dana dan kebijakan yang akan diterapkan kepada Kroasia diatur dalam perjanjian stabilisasi dan asosiasi (*Stabilisation and Association Agreement*) yang disepakati oleh kedua belah pihak pada tahun 2001 (*Summary of Treaty*, 2012).

Dalam upaya perluasan Eropa, promosi demokrasi yang dilakukan Uni Eropa kepada Kroasia adalah isu yang cukup penting mengingat bahwa Kroasia adalah negara yang sebelumnya berada dalam pengaruh ideologi komunis yang besar.

#### **A. Sejarah Terbentuknya Uni Eropa**

Uni Eropa merupakan federasi ekonomi dan politik yang hingga tahun 2013 telah memiliki 28 negara anggota. Uni Eropa secara resmi didirikan pada tahun 1993 dengan penandatanganan Perjanjian tentang Uni Eropa, perjanjian ini disebut sebagai Perjanjian Maastricht. Terbentuknya Uni Eropa sendiri melalui beberapa proses yang cukup panjang dengan melalui beberapa perjanjian di tahun – tahun sebelumnya. Tercatat ada lima peristiwa penting sebelum Perjanjian Maastricht yang mendukung

terbentuknya integrasi negara – negara Eropa tersebut (Indonesia-EU, 2007).

## **B. Lembaga-Lembaga Uni Eropa**

Uni Eropa mempunyai 3 lembaga dimana setiap lembaga tersebut dipimpin oleh presiden (European Union) :

### 1. Presiden Parlemen Eropa (*European Parliament President*)

Presiden parlemen Eropa saat ini dipimpin oleh perwakilan dari Negara Jerman yaitu Martin Schulz. Ia menjabat sebagai presiden parlemen Eropa dengan masa jabatan 2014 hingga 2017. Jabatan presiden ini ditentukan oleh anggota parlemen Uni Eropa. Sebagai presiden, Martin Schulz mempunyai peran yaitu:Memastikan prosedur parlemen diikuti dengan benar, mengawasi berbagai kegiatan dan komite Parlemen, mewakili Parlemen dalam segala hal hukum dan dalam hubungan internasional, memberikan persetujuan akhir untuk anggaran Uni Eropa.

### 2. Presiden Dewan Uni Eropa (*European Council President*)

Presiden dewan Uni Eropa dipimpin oleh Donald Tusk yang menjabat dari bulan Desember 2014

hingga Mei 2017, menggantikan presiden sebelumnya yaitu Herman Van Rompuy yang menjabat sejak Juni 2012 hingga November 2014.

Ada tiga peran utama presiden Dewan Uni Eropa yaitu:Memimpin kerja Dewan Eropa dalam menetapkan arah politik umum dan prioritas-prioritas Uni Eropa– dalam kerjasamanya dengan Komisi, Meningkatkan kohesi dan konsensus dalam Dewan Eropa, Mengawasi isu-isu luar negeri dan keamanan Uni Eropa.

### 3. Presiden Komisi Eropa (*European Commission President*)

Presiden komisi Uni Eropa dipimpin oleh Jean-Claude Juncker yang menjabat sejak menjabat November 2014 hingga Oktober 2019. Jean-Claude ditunjuk oleh kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara-negara anggota Uni Eropa dengan persetujuan dari Parlemen Eropa. Perannya di Uni Eropa adalah:Memberikan bimbingan politik kepada Komisi, Mengambil keputusan dan memimpin pertemuan tinggi para

komisioner, Memimpin kerja Komisi dalam melaksanakan kebijakan Uni Eropa, Mengambil bagian dalam pertemuan G7, Berkontribusi dalam diskusi besar baik di Parlemen Eropa dan pemerintah Uni Eropa dalam Dewan Uni Eropa.

### C. Badan – Badan Uni Eropa

#### 1. Mahkamah Eropa (*European Court of Justice*)

Mahkamah Eropa ialah lembaga peradilan tertinggi dalam Uni Eropa menurut Hukum Uni Eropa. Institusi ini dibentuk pada tahun 1952 dan berada di Luxemburg. Anggotanya diisi oleh hakim dari masing-masing negara anggota Uni Eropa ditambah 11 advokat umum. Untuk sidang umum diisi oleh 47 hakim, dan rencananya pada tahun 2019, akan meningkat menjadi 56 hakim.

Mahkamah Eropa bertugas untuk menafsirkan hukum Uni Eropa dan memastikan hukum tersebut diterapkan dengan cara yang sama di semua negara Uni Eropa, dan menetapkan sengketa hukum antara pemerintah nasional dan lembaga Uni Eropa (Court of Justice of the European Union). Mahkamah Eropa berfungsi sebagai lembaga yudikatif, berwenang menyelesaikan berbagai konflik kepentingan

internal Uni Eropa dan memberikan opini mengenai berbagai persetujuan internasional yang dilakukan oleh Uni Eropa. Secara umum tugas Mahkamah Eropa adalah memastikan adanya pemahaman, interpretasi dan aplikasi yang sama dari negara-negara anggota Uni Eropa terhadap hukum Uni Eropa (Pasal 220 s/d 245 Traktat Masyarakat Eropa).

#### 2. Mahkamah Audit Eropa (*Court of Auditors*)

Mahkamah Audit Eropa ialah badan yang bertugas untuk mengaudit dan mengawasi anggaran dana di Uni Eropa. Badan ini juga berpusat di Luxemburg dan mempunyai anggota dari masing-masing negara Uni Eropa. Mahkamah Audit Eropa mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan apakah semua pemasukan dan pengeluaran UE dilakukan secara hukum dan tidak melanggar aturan, serta apakah manajemen keuangan anggaran UE dilaksanakan secara sehat. Mahkamah ini juga dapat melakukan pemeriksaan atas permintaan salah satu lembaga UE. Selain itu, Mahkamah Audit juga dapat melakukan pemeriksaan di negara anggota UE untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh negara tersebut yang mengatasnamakan UE, seperti penarikan bea masuk, manajemen *Regional Funds* dan hal lainnya.

### 3. Bank Sentral Eropa (*European Central Bank*)

Bank Sentral Eropa saat ini dipimpin oleh seorang presiden yaitu Mario Draghi. Anggotanya adalah presiden, wakil presiden dan seluruh kepala bank sentral nasional dari negara-negara anggota. Bank ini bertempat di Frankfurt, Jerman (European Central Bank). Bank Sentral Eropa dibentuk pada bulan Juni tahun 1998, yang tugas pertamanya adalah mempersiapkan kerangka kerja operasional untuk kebijakan moneter tunggal yang akan dimulai pada awal tahun berikutnya.

Dan akhirnya pada 1 Januari 1999, secara resmi *Euro* menjadi mata uang tunggal negara-negara anggota *Euro Area*. Fungsi Bank Sentral Eropa antara lain menjadi pusat pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan moneter, memastikan diimplementasikannya keputusan, memiliki kewenangan sebagai regulator, serta menginisiasi peraturan-peraturan disektor moneter dan perbankan. Untuk menjaga stabilitas finansial di kawasan, Bank Sentral Eropa melaksanakannya melalui analisa ekonomi dan analisa moneter. Analisa ekonomi mendasarkan diri pada kondisi ekonomi dan finansial. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan harga dalam kaitannya dengan permintaan dan penawaran barang. Disisi lain analisa

moneter dipakai untuk mencermati perkembangan sektor moneter termasuk besaran inflasi (European Central Bank, 2006)

### 4. Dewan Eropa (*European Council*)

Selain kelima institusi utama tersebut, UE juga mempunyai *The European Council* atau Dewan Eropa (berbeda dengan *The Council of the European Union* atau *Dewan UE*).

Dewan Eropa adalah forum pertemuan para Kepala Negara dan Pemerintahan negara-negara anggota Uni Eropa dan Presiden Komisi Eropa. Pasal 4 TEU mensyaratkan Dewan untuk bersidang paling tidak 2 kali dalam setahun dibawah kepemimpinan Kepala Negara atau Pemerintah negara anggota yang sedang menjabat sebagai Presidensi UE (berganti setiap 6 bulan). Pada prakteknya setiap Presidensi biasanya mengadakan 1 sidang formal dan 1 sidang informal Dewan Eropa.

### **D. Proses Penambahan Anggota Baru Uni Eropa**

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi yang cukup terbuka menerima negara lain yang tentunya masih dalam kawasan eropa untuk bergabung menjadi anggota tetap Uni Eropa. Namun ada beberapa aturan dan tahapan yang sudah diatur apabila sebuah negara memutuskan ingin ikut bergabung.

Aturan paling umum yang harus dipenuhi oleh negara tersebut ialah penerapan Kriteria Kopenhagen di dalam sistem pemerintahannya. Secara singkat, Kriteria Kopenhagen ialah peraturan yang menetapkan apakah suatu negara layak untuk bergabung dengan Uni Eropa. Kriteria ini mensyaratkan bahwa suatu negara memiliki institusi untuk melindungi pemerintahan demokratis dan hak asasi manusia, memiliki ekonomi pasar yang berfungsi, dan menerima kewajiban dan tujuan UE. Kutipan dari kesimpulan Kepemimpinan Kopenhagen (Copenhagen European Council, 1993):

“ *Untuk menjadi anggota, negara kandidat disyaratkan untuk memperoleh stabilitas institusi yang menjamin demokrasi, aturan hukum, hak asasi manusia, penghormatan dan perlindungan kaum minoritas, keberadaan ekonomi pasar yang berfungsi dan kemampuan untuk menghadapi tekanan kompetitif dan kekuatan pasar di Uni Eropa. Negara kandidat disyaratkan memiliki kemampuan mematuhi kewajiban keanggotaan termasuk patuh dengan tujuan politik,*

*ekonomi dan moneter Uni Eropa.*

”

Sebagian besar elemen ini telah diklarifikasi dalam satu dasawarsa terakhir oleh undang-undang Dewan Eropa, Komisi Eropa dan Parlemen Eropa, serta hukum kasus Mahkamah Eropa dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Selama negosiasi dengan masing-masing negara anggota, tahapan menuju pencapaian kriteria Kopenhagen akan terus dipantau secara rutin. Melalui dasar tersebut, keputusan dibuat mengenai apakah dan kapan suatu negara harus bergabung, atau tindakan apa yang perlu diambil sebelum memungkinkan penggabungan dengan Uni Eropa

## **E. Sejarah Kroasia**

Kroasia menjadi bagian dari negara federal Yugoslavia sejak tahun 1918. Terdapat enam negara republik dalam federasi Yugoslavia yaitu Bosnia, Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Montenegro, dan Slovenia. Selain itu, Yugoslavia juga mempunyai dua daerah otonomi khusus yaitu Kosovo dan Vojvodina. Yugoslavia beribukota di Beograd dan hingga tahun 1941, Serbia memiliki peran yang penting dalam

pemerintahan negara Federal Yugoslavia (Gagnon, 1995).

## **F. Profil Negara Kroasia**

Pada bulan Juni tahun 1991, Kroasia secara resmi menjadi negara merdeka. Kroasia ialah negara kesatuan Republik yang menganut sistem parlementer. Luas wilayah negara ini sekitar 56.594 km persegi dengan luas wilayah laut 575 km persegi. Sedangkan dalam bahasa sehari-hari, bahasa yang digunakan adalah bahasa Kroasia. Mayoritas penduduk Kroasia beragama Katolik dengan persentase sebesar 81,3%, agama ortodoks sebanyak 4,4%, agama Islam 1,5% dan 7,8% beragama lainnya. Jika dipandang secara etnis, maka etnis Kroasia terdiri dari 90,4%, etnis Serbia 4,4%, dan etnis lainnya sekitar 4,4% yang terdiri dari Bosnia, Hungaria, Ceko dan Albania. Selain itu, Kroasia juga memiliki situs kebudayaan yang telah diakui oleh UNESCO (*The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) yaitu Taman Nasional Plitvice dan Kota Dubrovnik ([http://www.kemlu.go.id/zagreb/Books/Facts%20Figure-Croatia-3\\_01.jpg](http://www.kemlu.go.id/zagreb/Books/Facts%20Figure-Croatia-3_01.jpg))

## **G. Kroasia Setelah Merdeka**

Setelah memproklamkan kemerdekaannya, Kroasia dihadapkan

dengan masalah etnis yang melibatkan Serbia dan Bosnia. Beragamnya etnis yang bermukim di ketiga wilayah tersebut tidak bisa menghindarkan Kroasia dari perang besar yang disebut sebagai Perang Bosnia.

## **Perang Bosnia**

Perang Bosnia (Bosnian War; Rat u Bosni) adalah sebutan untuk perang yang terjadi di wilayah Bosnia-Herzegovina (saat itu masih menjadi bagian dari wilayah Yugoslavia) antara tahun 1992 hingga 1995. Secara garis besar, perang ini merupakan konflik bersenjata antara etnis Bosniak, etnis Kroasia / Kroat, & etnis Serbia / Serb yang memiliki kepentingannya masing-masing. Etnis Bosniak ingin menjadikan Bosnia sebagai negara merdeka. Etnis Kroasia ingin menggabungkan sebagian wilayah Bosnia dengan wilayah negara Kroasia. Sementara etnis Serbia yang sedang mendominasi pemerintahan Yugoslavia ingin mempertahankan keutuhan sisa-sisa wilayah Yugoslavia.

Perang Bosnia merupakan konflik terbesar & terparah dalam periode disintegrasi Yugoslavia yang berlangsung selama dekade 90-an. Selama perang, banyak terjadi aksi pembantaian antar etnis di mana aksi-aksi tadi didominasi oleh pasukan dari etnis Serbia. Penyebab utama mengapa

intensitas perang di Bosnia bisa sedemikian parah adalah karena Bosnia merupakan negara bagian Yugoslavia yang komposisi penduduknya paling beragam & lokasinya tepat berada di tengah-tengah Yugoslavia. Ketika perang berakhir, Bosnia menjadi negara merdeka dengan sistem pemerintahan yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk mencegah dominasi etnis tertentu dalam pemerintahan Bosnia.

Karena etnis-etnis yang terlibat dalam Perang Bosnia memiliki komposisi agama mayoritas yang berbeda 1 sama lain, Perang Bosnia lantas menjadi magnet bagi relawan-relawan asing untuk ikut berperang di Bosnia atas dasar solidaritas agama & etnis. Sebagai contoh, etnis Bosniak yang mayoritasnya beragama Islam dibanjiri oleh milisi-milisi mujahidin yang datang dari Timur Tengah & minoritas Muslim di negara-negara Barat. Sementara etnis Kroasia yang mayoritasnya Katolik mendapat bantuan dari para anggota Neo-Nazi di negara-negara Eropa Barat & Utara. Etnis Serbia yang mayoritasnya Kristen Ortodoks sendiri mendapat bantuan dari para relawan Yunani & negara-negara pecahan Uni Soviet.

Tanggal 6 April 1992 organisasi Uni Eropa menyatakan pengakuannya atas kemerdekaan Bosnia. Sehari kemudian,

giliran Amerika Serikat yang menyatakan pengakuannya atas kemerdekaan Bosnia. Merasa geram karena dunia internasional memilih untuk mengakui Bosnia sebagai negara merdeka alih-alih bagian dari wilayah Yugoslavia, militer Yugoslavia (Serbia) yang dibantu oleh milisi-milisi Serbia memulai invasinya ke ibukota Sarajevo & sekitarnya. Karena pasukan Serbia memiliki keunggulan dalam hal persenjataan, mereka sukses menduduki area di sekitar Sarajevo dalam waktu relatif singkat. Di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan oleh pasukan Serbia, banyak warga sipil Bosniak & Kroasia yang menjadi sasaran pembunuhan, penyiksaan, & pemerkosaan massal.

Bulan Juni 1992, pasukan Bosniak & Kroasia yang awalnya bersekutu terlibat konflik satu sama lain karena negara Kroasia berniat mencaplok wilayah Bosnia selatan yang populasinya didominasi oleh etnis Kroasia. Bosnia pun kini menjadi arena konflik segitiga antara etnis Bosniak, Kroasia, & Serbia. Seperti nasib saudara-saudaranya di Bosnia timur, orang-orang Bosniak yang berada di wilayah taklukan pasukan Kroasia juga menjadi sasaran pembantaian & pemerkosaan massal. Memasuki akhir tahun 1992, seluruh wilayah Bosnia selatan sudah berada di tangan pasukan Kroasia. Sementara wilayah Bosnia



utara & timur berada di bawah kendali pasukan Serbia. Wilayah sisanya yang mencakup Bosnia tengah & barat laut merupakan wilayah yang masih berada di bawah kekuasaan pasukan Bosniak.

Dunia internasional sendiri bukannya diam saja melihat situasi di Bosnia yang semakin berlarut-larut. Bulan Mei 1992, PBB menjatuhkan sanksi & pengucilan internasional kepada pemerintah pusat Yugoslavia. Sebulan kemudian, pasukan perdamaian PBB (UNPROFOR) diterjunkan ke Bosnia. Lalu pada bulan April 1993, NATO atas izin PBB menerapkan zona larangan terbang di atas wilayah Yugoslavia. Di bulan berikutnya, PBB mengumumkan pendirian "zona aman PBB" sebagai daerah penampungan warga sipil Bosnia yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang bersenjata (dengan pengecualian untuk tentara PBB tentunya). Ada 6 daerah yang dijadikan zona aman PBB, yaitu Sarajevo, Srebrenica, Gorazde, Tuzla, Zepa, & Bihac.

Bulan Maret 1994, via perundingan yang difasilitasi oleh AS di ibukota Washington, perwakilan Kroasia-Bosnia & Bosniak sepakat untuk berhenti memerangi satu sama lain. Kedua belah pihak juga sepakat menyatukan wilayah kekuasaannya masing-masing menjadi "Federasi Bosnia & Herzegovina". Dengan dicapainya

keepakatan ini, konflik di Bosnia pun kembali mengerecut menjadi konflik 2 sisi antara pasukan etnis Kroasia & Bosniak melawan pasukan etnis Serbia. Dikombinasikan dengan bantuan persenjataan & serangan udara pasukan NATO, pasukan koalisi Bosniak-Kroasia sukses menaklukkan wilayah demi wilayah yang awalnya dikuasai oleh pasukan etnis Serbia. Situasi makin runyam bagi etnis Serbia karena sanksi embargo yang dijatuhkan PBB atas Yugoslavia membuat Yugoslavia dilanda krisis ekonomi (<http://www.re-tawon.com/2015/03/perang-bosnia-banjir-darah-di-jantung.html>).

#### **H. Uni Eropa di Kroasia**

Masuknya Uni Eropa ke Kroasia tidak terlepas dari kondisi saat itu dimana Yugoslavia mengalami krisis yang membuat beberapa wilayah terpecah dan menyatakan kemerdekaannya. Pada tahun 1990, Uni Eropa mulai menawarkan bantuan finansial melalui berbagai program pembangunan yang tidak mungkin ditolak Kroasia, yang posisinya sebagai negara yang baru saja lepas dari pecahnya Yugoslavia dan sedang mengalami krisis ekonomi serta keamanan. Sejak saat itu Uni Eropa bagaikan pendonor darah kehidupan baru bagi Kroasia yang teru menjalin kerjasama hingga saat ini.

## **1. Program-program Pendanaan Uni Eropa di Kroasia**

Bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa kepada Kroasia berawal pada akhir tahun 1990. Saat itu Kroasia masih dalam proses transisi dari periode sulit selama konflik bersenjata di tahun 1991. Tercatat sejak tahun 1991 hingga tahun 2000 Uni Eropa telah mengeluarkan dana bantuan ke Kroasia sebesar 381,61 juta Euro dalam berbagai program bantuan.

Pada tahun 1991-1995, krisis wilayah membutuhkan dana yang dikerahkan pada skala yang lebih besar untuk bantuan kemanusiaan melalui *European Commission Humanitarian Office* atau yang dikenal dengan sebutan ECHO. Bantuan sebesar 243,2 juta Euro dari total 244,870 juta Euro difokuskan untuk manajemen krisis dan pembangunan ulang. Selain itu, bantuan berupa makanan dan kesehatan juga diberikan melalui dana tersebut ( *A Handbook on Financial Cooperation and European Union Supported Programmes in Croatia* , 2009).

Lalu pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 1996-2000 bantuan difokuskan untuk mendukung pemerintahan Kroasia untuk membangun kembali infrastruktur privat dan infrastruktur umum, serta kehidupan

masyarakat melalui promosi menghargai hak asasi manusia dan rekonsiliasi. Sejak tahun 1996, pendanaan yang dilakukan oleh OBNOVA berupa paket substansial dalam mendorong pengembalian dan reintegrasi pengungsi telah dilaksanakan.

Target bantuan OBNOVA ditujukan pada proses pengembalian pengungsi dan untuk pemulihan kehidupan agar kembali normal. Rekonstruksi rumah dilakukan secara paralel dengan pembangunan kembali pusat-pusat kesehatan dan sekolah, pasokan air skala kecil, listrik dan lorong-lorong kota yang dibiayai melalui komponen rekonstruksi rumah, infrastruktur public dan sosial. Sebagai tambahan, OBNOVA juga membantu revitalisasi ekonomi skala kecil yang ditujukan untuk kehidupan sehari-hari yang berfokus pada penyediaan paket keuangan start-up dan dukungan dalam kebangkitan usaha kecil terutama di sektor pariwisata, pertanian dan kerajinan.

Pada tahun 2000, bantuan yang diberikan ke Kroasia semakin dirampingkan oleh Komisi Eropa. Anggaran yang disediakan dari OBNOVA digunakan untuk bantuan teknis yang ditentukan oleh kementerian sebesar 4,5 juta Euro. Persiapan bertahap untuk program CARDS juga telah dimulai. Kroasia juga telah memenuhi syarat untuk

dukungan lapangan pendidikan tinggi, meskipun akhirnya program Tempus dan Lingkungan dilakukan melalui program LIFE Third Countries ( Program untuk negara-negara ketiga).

## **2. Ajakan Demokrasi kepada Kroasia**

Pada tanggal 4 Maret 1998, Menteri Uni Eropa yang menangani masalah Integrasi memberikan tawaran kepada Kroasia untuk bergabung kedalam Uni Eropa. Tawaran ini tentu saja sangat menarik mengingat Kroasia baru saja mengalami gejolak politik dan keamanan yang sangat besar yaitu dengan pecahnya negara Yugoslavia. Tawaran tersebut langsung disambut positif oleh pemerintah Kroasia. Sebagaimana negara pecahan Yugoslavia lainnya, Kroasia langsung membuat perjanjian *Stabilisation and Association Agreement (SAA)* dengan Uni Eropa. Pembahasan perjanjian ini pun berlangsung dengan cukup cepat setelah penawaran dari Menteri Uni Eropa yaitu hanya sekitar 3 tahun. Pada tanggal 29 Oktober 2001, perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi sudah dapat ditandatangani oleh kedua pihak ([http://www.vlada.hr/en/naslovnica/priopcenja\\_za\\_javnost/2011/sijecanj/predsjednica\\_vlade\\_s\\_paulom\\_vandorenom](http://www.vlada.hr/en/naslovnica/priopcenja_za_javnost/2011/sijecanj/predsjednica_vlade_s_paulom_vandorenom))

## **3. Stabilisation and Association Agreement (SAA)**

Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi (SAA) adalah perjanjian asosiasi khusus, yang ditawarkan oleh Uni Eropa untuk negara-negara yang termasuk dalam Proses Stabilisasi dan Asosiasi, salah satunya adalah Kroasia. SAA memberikan penandatanganan status anggota asosiasi dan calon potensial untuk keanggotaan di Uni Eropa. Untuk Republik Kroasia, Perjanjian ini adalah yang pertama dan satu-satunya langkah kontraktual dalam perjalanan ke akses ke keanggotaan Uni Eropa. Tujuan dari SAA adalah untuk membangun dialog politik, menyelaraskan undang-undang, mempromosikan hubungan ekonomi, mengembangkan zona perdagangan bebas, Pastikan daerah kerjasama dan dukungan kerjasama di banyak daerah lain.

Dengan menandatangani Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi pada tanggal 29 Oktober 2001, Republik Kroasia memasuki hubungan kontrak dengan Uni Eropa untuk pertama kalinya. Hal ini menandai langkah formal yang paling penting dalam proses Republik Kroasia pemulihan hubungan dengan Uni Eropa, yang didahului pengajuan aplikasi untuk keanggotaan penuh, akuisisi

status kandidat dan pembukaan negosiasi akses.

Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi ditandatangani antara Republik Kroasia dan Masyarakat Eropa dan Negara-negara Anggota tidak dipaksa dalam melakukan penandatanganan ini. Agar SAA bisa berlaku dan dijalankan maka harus diratifikasi oleh semua pihak yang diwakili: Parlemen Kroasia dan Parlemen Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa. Setelah selesai prosedur ratifikasi, SAA mulai berlaku pada 1 Februari 2005.

Setelah Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi antara Republik Kroasia dan Masyarakat Eropa dan Negara-negara Anggota dan Perjanjian Interim, yang berlaku sampai mulai diberlakukannya SAA itu, Protokol pada perluasan dilampirkan pada Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi, yang dikenal sebagai Protokol 7, ditandatangani pada 21 Desember 2004. Protokol ini mempertimbangkan perluasan Uni Eropa oleh lebih sepuluh negara anggota baru dan mengatur akses mereka ke SAA dan Perjanjian Interim. Tujuan utama dari Protokol ini adalah untuk menyesuaikan ketentuan SAA dan Perjanjian Interim yang mengacu pada perdagangan produk pertanian, bahan makanan dan produk

perikanan, sehingga dapat secara tepat mengatur hubungan perdagangan Republik Kroasia dengan Uni Eropa yang semakin luas (Ministry of Foreign Affairs and European Integration).

## **I. Bergabungnya Kroasia ke Uni Eropa**

Pada umumnya, proses masuknya Kroasia ke Uni Eropa dilakukan dengan cara Kroasia harus mematuhi semua peraturan yang telah dibuat oleh Uni Eropa, yang memiliki persetujuan dari lembaga Uni Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa, serta memiliki persetujuan dari warga negara mereka. Dalam sejarahnya Kroasia mulai tertarik untuk menjadi anggota Uni Eropa yaitu pada 24 November 2000, Kroasia dan Uni Eropa membentuk rancangan *Stabilization and Association Agreement* (SAA) untuk Balkan Barat. Dengan adanya kesepakatan tersebut kedua pihak berharap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan politik di wilayah Balkan Barat (European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations, 2012).

Pada Februari 2003, Kroasia mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Uni Eropa. Sikap Kroasia ini kemudian memunculkan banyak spekulasi yang berasal dari masyarakat Kroasia dan Uni Eropa

tentang apakah Kroasia bisa menjadi anggota Uni Eropa atau tidak (Ott, 2006). Upaya Kroasia untuk menjadi anggota Uni Eropa kemudian membuahkan hasil pada April 2004 ketika Komisi Eropa memutuskan untuk menerima permintaan pengajuan keanggotaan Kroasia. Selanjutnya dua bulan kemudian yaitu pada Juni 2004 Uni Eropa memberikan status kandidat anggota Uni Eropa kepada Kroasia (Samardzija, 2014).

Dengan keputusan tersebut maka Kroasia harus menyetujui *Copenhagen Criteria*. Seluruh negara kandidat harus memenuhi kriteria penting dalam proses akses yang tercantum dalam *Copenhagen Criteria* yang dibentuk pada Juni 1993. Dalam hal ini, isi dari *Copenhagen Criteria* adalah negara kandidat harus memiliki: pertama, stabilitas lembaga yang menjamin demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan menghormati perlindungan bagi kaum minoritas. Kedua, keberadaan ekonomi pasar yang berfungsi dan kemampuan untuk menghadapi tekanan kompetitif atas kekuatan pasar di Uni Eropa. Ketiga, negara kandidat harus memiliki dan mematuhi kewajiban keanggotaan termasuk patuh dengan tujuan politik, ekonomi dan moneter Uni Eropa (Rezler, 2011).

Pada akhir 2004, proses penerimaan Kroasia menjadi anggota Uni Eropa mengalami kendala dalam dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan ICTY (*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*). Hal ini disebabkan karena Kroasia melindungi para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Tersangka utamanya yang harus diserahkan Kroasia ke ICTY adalah Jenderal Ante Gotovina yang dilindungi oleh masyarakat Kroasia karena dianggap sebagai pahlawan dalam konflik di Balkan pada 1990-an. Alasan inilah yang menyebabkan Kroasia enggan untuk menyerahkan Jenderal Ante ke ICTY.<sup>84</sup> Dengan adanya permasalahan ini maka Kroasia dianggap tidak dapat memenuhi *Copenhagen Criteria* mengenai penerapan nilai-nilai Demokrasi dan HAM. Keengganan Kroasia ini kemudian membuat Uni Eropa mengancam akan menunda negosiasi terbuka hingga Kroasia dapat bekerjasama dengan ICTY. Dengan adanya sikap tegas Uni Eropa tersebut, maka Kroasia menunjukkan sikap kooperatif dengan ICTY. Hal ini dibuktikan dengan penyerahan Jenderal Ante kepada ICTY. Faktanya sikap kooperatif Kroasia terhadap ICTY inilah yang kemudian menjadi langkah awal dilaksanakannya negosiasi terbuka. Pada Oktober 2005,

Kroasia melakukan negosiasi terbuka dengan Uni Eropa mengenai kelanjutan rencana masuknya Kroasia ke dalam organisasi regional Eropa tersebut (Koerner, 2013).

Pada tahun-tahun selanjutnya, Uni Eropa dan Kroasia terus melakukan negosiasi dan perjanjian kerjasama yang dinilai menguntungkan kedua belah pihak hingga pada akhirnya tanggal 1 Juli 2013 menjadi hari yang bersejarah bagi Uni Eropa dan Kroasia dengan menjadi anggota ke 28 dari Uni Eropa. Kroasia menjadi negara pertama dalam kutun waktu 6 tahun terakhir yang berhasil masuk dalam integrasi negara eropa tersebut setelah tahun 2007 Uni Eropa menerima dua negara sekaligus yaitu Bulgaria dan Rumania (BBC Indonesia, 2013).

### **Kesimpulan**

Membentuk sebuah komunitas kerjasama ekonomi pada sektor batubara, negara-negara Eropa Barat kemudian menjelma menjadi sebuah kesatuan yang kokoh dan terus berkembang mendominasi pasar eropa dan dunia. Uni Eropa membangun sebuah sistem yang sangat dinamis dalam kerjasama ekonomi yang kemudian menjadi sebuah kerjasama berbagai sektor strategis demi memperluas hegemoninya di kawasan tersebut. Menambah anggota baru pun menjadi sebuah

kebutuhan apabila Uni Eropa ingin mengembangkan kerjasama serta memperkuat pengaruhnya di dunia menyaingi negara-negara kawasan lainnya.

Melalui *European Enlargement Enlargement Policy* seperti yang tercantum pada pasal 49 *Treaty of European Union* (TEU), Uni Eropa secara massif membantu memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial Kroasia yang kemudian berefek pada keamanan yang lebih baik pasca perang saudara di Yugoslavia. Tercatat dalam kurun waktu 10 tahun sejak tahun 1990 hingga 2000, Uni Eropa telah mengeluarkan dana lebih dari 380 juta Euro untuk membantu Kroasia. Bantuan tersebut dilakukan dengan bertahap melalui berbagai program ekonomi, pendidikan, perbaikan infrastruktur, hingga bantuan dalam penerapan hukum dan politik di negara tersebut. Tidak hanya bantuan materi, Uni Eropa juga menunjukkan kepada Kroasia bagaimana cara menerapkan konsep *good governance* salah satunya ialah dengan penerapan sistem demokrasi yang membuat setiap orang di Kroasia mempunyai hak dan kedudukan hukum yang sama.

Uni Eropa melakukan promosi demokrasi melalui cara persuasif dengan berbagai bantuan yang diberikan sebagai salah satu usaha perluasan Eropa dan sebagai

usaha Eropa dalam mewujudkan *good governance*. Uni Eropa memberikan bantuan finansial maupun teknis kepada Kroasia dengan tujuan agar kondisi politik dan ekonominya dapat stabil, dan di samping itu, agar Kroasia dapat lebih demokratis dan pengaruh Uni Eropa dapat menjadi semakin luas di kawasan Eropa Timur.

Upaya Uni Eropa dalam melakukan promosi demokrasi di Kroasia dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari respon Kroasia, baik warga dan pemerintahannya yang menerima dengan tangan terbuka bantuan oleh Uni Eropa. Tidak hanya sampai disitu, Kroasia juga menyatakan diri tertarik dan bersungguh-sungguh untuk bergabung dengan Uni Eropa agar tetap bekerjasama dalam berbagai bidang. Berbagai usaha dan ketentuan dari Uni Eropa secara perlahan mulai diikuti oleh Kroasia hingga pada tahun 2005, Uni Eropa secara resmi membahas Kroasia untuk menjadi anggota tetap Uni Eropa. Pada tahun 2013, setelah mengalami berbagai tahapan, Kroasia akhirnya resmi menjadi anggota terbaru Uni Eropa dan menjadi perpanjangan tangan Uni Eropa di kawasan Eropa Timur untuk terus berupaya memperluas wilayahnya.

## Daftar Pustaka

Crijenko, I. (2013). Croatia Land and People. 57-58 .

*Summary of Treaty*. (2012, September 7). Retrieved December 12, 2016, from Treaties Office Database:

<http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=140>

Indonesia-EU. (2007). *Indonesia-EU Homepage*. Retrieved January 16, 2017, from Sejarah Uni Eropa: <http://www.indonesianmission-eu.org/website/page943418664200310095958555.asp#top>

European Union. (n.d.). *EU Presidents – who does what?* Retrieved January 17, 2017, from About The EU.

*Court of Justice of the European Union*. (n.d.). Retrieved January 17, 2017, from About The EU: [https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice\\_en](https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en)

*European Central Bank*. (n.d.). Retrieved January 17, 2017, from About The Eu: [https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-central-bank\\_en](https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-central-bank_en)

European Central Bank. (2006). The European Central Bank, The Eurosystem, The European System of Central Banks.

Copenhagen European Council. (1993). Presidency Conclusions.

Gagnon, V. P. (1995). The Case of Serbia, *International Security Journal*, Vol. 19 No.3. *Ethnic Nationalism and International Conflict* , 141.

[http://www.kemlu.go.id/zagreb/Books/Facts%20Figure-Croatia-3\\_01.jpg](http://www.kemlu.go.id/zagreb/Books/Facts%20Figure-Croatia-3_01.jpg). (n.d.). Retrieved January 29, 2017, from [http://www.kemlu.go.id/zagreb/Books/Facts%20Figure-Croatia-3\\_01.jpg](http://www.kemlu.go.id/zagreb/Books/Facts%20Figure-Croatia-3_01.jpg)

<http://www.re-tawon.com/2015/03/perang-bosnia-banjir-darah-di-jantung.html>. (n.d.). Retrieved February 24, 2017, from <http://www.re-tawon.com/2015/03/perang-bosnia-banjir-darah-di-jantung.html>

A Handbook on Financial Cooperation and European Union Supported Programmes in Croatia . (2009). *EUROPEAN FUNDS FOR CROATIAN PROJECTS* , 12.

[http://www.vlada.hr/en/naslovnica/priopcenja\\_za\\_javnost/2011/sijecanj/predsjednica\\_vlade\\_s\\_paulom\\_vandorenom](http://www.vlada.hr/en/naslovnica/priopcenja_za_javnost/2011/sijecanj/predsjednica_vlade_s_paulom_vandorenom). (n.d.). Retrieved January 19, 2017, from [http://www.vlada.hr/en/naslovnica/priopcenja\\_za\\_javnost/2011/sijecanj/predsjednica\\_vlade\\_s\\_paulom\\_vandorenom](http://www.vlada.hr/en/naslovnica/priopcenja_za_javnost/2011/sijecanj/predsjednica_vlade_s_paulom_vandorenom)

Ministry of Foreign Affairs and European Integration. (n.d.). *Negotiations with The EU*. Retrieved January 20, 2017, from Project Europe in Croatia: <http://mei.multilink.hr/english/negotiations.html>



*European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations*. (2012, December 6). Retrieved January 20, 2017, from European Commission: [http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_en.htm)

Ott, K. (2006). *Croatian Accession To The European Union, Institutional Challenges of participation Vol. 4*. Zagreb: Institute of Public Finance.

Samardzija, H. B. (2014). *Challenges of Continued EU Enlargement to the Western*.

Rezler, P. (2011). *The Copenhagen Criteria, Are They Helping or Hurting the European Union? Vol. 14 No.2*. Touro International Law Review.

Koerner, K. (2013). *Croatia Facing Challenges on the EU's doorstep, Deutsche Bank AG DB*. Germany: Research Frankfurt am Main.

BBC Indonesia. (2013, July 1). *Kroasia jadi anggota ke 28 Uni Eropa*. Retrieved January 22, 2017, from BBC Dunia: [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130701\\_kroasia\\_eu](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130701_kroasia_eu)

(2013). *The Future of EU Enlargement*. European Union Committee.

Manners, I. (2011). The International Role of the EU. *Normative Power Europe* .

*Understanding the Concept of Governance*. (2015). Retrieved April 3, 2016, from The Global Development Research Center: <http://www.gdrc.org/u-gov/governance-understand.html>

Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan. (2000). *Dokumen Kebijakan UNDP* .

Ganie-Rochman, M. (2000). Prinsip, Komponen, dan Penerapannya. *Good Governance* .

Commission of The European Communities. (2001). European Governance White Paper. 5-8.

Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Emzir. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Indonesia-EU Homepage. (n.d.). *Dewan Eropa*. Retrieved January 18, 2017, from Indonesia-EU Homepage: <http://www.indonesianmission-eu.org/website/page309611537200308257908605.asp>

Treaty on the European Union. (1992, February 7). *The Maastricht Treaty* . Retrieved March 8, 2017, from Euro Treaties: [eurotreaties.com](http://eurotreaties.com)

The European Parliament. (1998). Enlargement of the European Union. *Legal Questions of Enlargement* .

West, R. (1995). *Tito and the Rise and Fall of Yugoslavia*. New York: Carol and Graff.

Shabani, D. Y. (2011). The Western Balkans Policy Review, Vol 1 Issue 2. *The European Union Politics in the Western Balkans* , 24.

*Enlargement strategy* . (2005). Retrieved January 19, 2017, from roadmap for the Western Balkans: [http://europa.eu/legislation\\_summaries/enlargement/western\\_balkans/e50021\\_en.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/e50021_en.htm)

<http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=713> . (n.d.). Retrieved January 29, 2017, from <http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=713>

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hr.html> . (n.d.). Retrieved February 2, 2017, from <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hr.html>

<http://www.sejarah-negara.com/2014/04/latar-belakang-yugoslavia.html>. (n.d.). Retrieved February 22, 2017, from <http://www.sejarah-negara.com/2014/04/latar-belakang-yugoslavia.html>

<http://sejaraheropa.wixsite.com/offering-b-2014/single-post/2015/04/16/Konflik-Yugoslavia> . (n.d.). Retrieved February 22, 22, from <http://sejaraheropa.wixsite.com/offering-b-2014/single-post/2015/04/16/Konflik-Yugoslavia>

Lampe, J. R. (2000). *Yugoslavia as History: Twice There Was a Country*. Cambridge: Cambridge University Press.

<http://e-nnw.com/josip-broz-tito/>. (n.d.). Retrieved February 23, 2017, from <http://e-nnw.com/josip-broz-tito/>

<http://sejaraheropa.wixsite.com/offering-b-2014/single-post/2015/04/16/Konflik-Yugoslavia>. (n.d.). Retrieved February 23, 2017, from <http://sejaraheropa.wixsite.com/offering-b-2014/single-post/2015/04/16/Konflik-Yugoslavia>

BBC Indonesia. (2011, April 11). *Penjahat Perang Kroasia Segera Divonis*. Retrieved January 19, 2017, from BBC Indonesia: [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/04/110414\\_croatiawar.shtml](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/04/110414_croatiawar.shtml)

BBC Indonesia. (2005, December 9). *Jenderal Preang Balkan Ditahan*. Retrieved January 19, 2017, from BBC World: [http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/12/051209\\_gotovinaarrested.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/12/051209_gotovinaarrested.shtml)

Grabbe, H. (2002). *European Union Conditionally and the Acquis Communautaire Vol 23 No.3 Hal 251*. International Political Science Review.

Samp, S. J. (2003). A Genealogy, European Union Studies Center , ACES Working Paper Series Paul H. Nitze School of Advanced. *Acquis Communautaire and European Exeptionalism* , 18.